



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023



## **PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624350

Website : [pn-semarapura.go.id](http://pn-semarapura.go.id) e-mail : [pnsrp@pn-semarapura.go.id](mailto:pnsrp@pn-semarapura.go.id)

Klungkung - Bali 80711



# *KATA PENGANTAR*



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas ijin dan Karunia-Nya maka Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2023 dapat diselesaikan dan tersusun dengan baik dan tepat waktu. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Semarang beserta jajaran dibawahnya dalam rangka mewujudkan *birokrasi bersih, akuntabel, kapabel* dan *pelayanan publik yang prima* melalui budaya kerja yang sederhana, simple, lincah dan cepat. Penyusunan laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Pengadilan Negeri Semarang sebagai salah satu Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan yang menjadi tupoksinya berdasarkan mandat yang telah diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban Pengadilan Negeri Semarang untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di wilayah Pengadilan Negeri Semarang adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas mandat yang diberikan dan juga penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatannya.

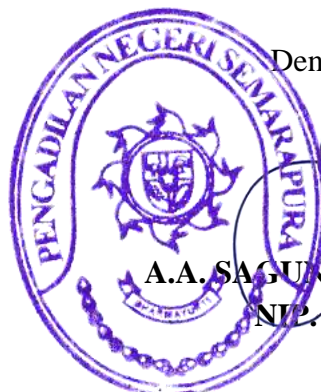
Dengan berakhirnya Tahun 2023 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di Tahun 2023. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu bentuk monitoring dan bahan evaluasi yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan juga untuk penyempurnaan tugas - tugas pada tahun yang akan datang sehingga segala hambatan dan kekurangan yang ada dapat diselesaikan dengan efisien, efektif dan berkualitas.

Kami menyadari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini masih jauh dari kesempurnaan dan tujuan yang diharapkan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja di wilayah Pengadilan Negeri Semarang berikutnya.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terimakasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif, baik pikiran, tenaga, dan materi segenap Aparatur di wilayah Pengadilan Negeri Semarang dalam mendukung yang telah mampu memberikan yang terbaik bagi pencari keadilan.

Denpasar, Januari 2024

Ketua



**A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.**  
**NIP. 197806092001122001**

# DAFTAR ISI



# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	5
BAB I. PENDAHULUAN.....	6
A.    KEBIJAKAN UMUM PERADILAN .....	7
B.    VISI DAN MISI.....	11
C.    RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) .....	11
BAB II. KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA, DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU .....	13
A.    KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA .....	14
B.    PENYELESAIAN PERKARA.....	16
C.    AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN) .....	18
•    Posbakum.....	19
BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA .....	22
A.    SUMBER DAYA MANUSIA.....	23
B.    MUTASI .....	26
C.    PROMOSI.....	27
D.    PENSIUN.....	28
E.    DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT).....	28
BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI .....	32
A.    PENGELOLAAN KEUANGAN.....	33
B.    PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA .....	39
C.    PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI .....	44
BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK .....	48
A.    AKREDITASI PENJAMINAN MUTU.....	49
B.    PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) .....	50
C.    INOVASI PELAYANAN PUBLIK .....	51
BAB VII. PENUTUP .....	57
A.    KESIMPULAN .....	58
B.    REKOMENDASI .....	58

# *BAB I. PENDAHULUAN*



## PENDAHULUAN

### A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Semarang merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI dibawah Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Semarang sebagai salah satu penyelenggara peradilan di tingkat pertama mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata dan juga harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu 2023, Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut selain berupa regulasi juga diutamakan dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Beberapa kebijakan Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Umum yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Semarang dan satuan kerja dibawahnya, antara lain sebagai berikut :

- ✚ Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur



serta memberikan kualitas pelayanan yang prima dan akuntabel, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dan etika. Pedoman Standar PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM03.3/2/2018 sebagaimana telah dirubah dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

- ✚ Penerapan aplikasi *E-Court* dengan fitur *e-filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), *e-summons* (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Melalui aplikasi *E-Court* pendaftar gugatan/permohonan dari seorang advokat ataupun pengguna terdaftar dapat melakukan pendaftaran di mana saja, kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan. Penerapan E-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018.
- ✚ Aplikasi Eraterang, sesuai dengan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) Di Lingkungan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengembangkan Aplikasi ERATERANG yang berguna untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa permohonan Surat Keterangan secara online. ERATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri yang dituju.

Adapun Surat Keterangan yang dapat dibuat di Aplikasi ERATERANG ini sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit.
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.
4. Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik.
5. Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

✚ Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana program Dirjen Badan Peradilan Umum untuk mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excelance*). Tahun 2017, Pengadilan Negeri Semarang dan telah diakreditasi. Selanjutnya kegiatan akreditasi ini berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

✚ Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang professional dan berfokus pada kompetensi, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi Sikep versi 3.1.0, yang dapat memberikan informasi kepada pimpinan pengadilan tentang peta Sumber Daya Manusia di satuan kerja hingga dapat membantu penambilan keputusan. Sistem ini terintegrasi dengan Sistem Kediklatan MA (Sisdiklat) dan Sistem Pengawasan (Siwas) untuk pertukaran data diklat pegawai dan verifikasi data pemeriksaan pegawai.

- ✚ Pengembangan aplikasi Sistem Pengawasan (Siwas) versi 3.0 yang memuat berbagai perbaikan dan penambahan menu gratifikasi dan menu benturan antar kepentingan. MA juga membangun E-Monitoring pengawasan, aplikasi yang digunakan untuk memonitoring hasil pelaksanaan pengawasan pada Badan Pengawasan yang dilakukan Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang pengadilan tingkat pertama. Aplikasi ini untuk keseragaman instrument pengawasan membantu tugas hakim pengawas.
- ✚ Kebijakan Mahkamah Agung dalam hal peningkatan kepercayaan publik dalam pengelolaan perkara, yang dilakukan dengan menerbitkan SEMA No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara Pada Pengadilan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menata kembali mekanisme pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan yang bukan Penerimaan Semarang Bukan Pajak (non-PNBP). Agar proses pelaksanaan peradilan pidana juga lebih terbuka dan akutanbel.
- ✚ Mahkamah Agung telah menyusun prosedur baru penyampaian relaas panggilan atau pemberitahuan pihak berperkara yang berada di luar negeri. MA dan Kementerian Luar Negeri telah memperbarui Nota Kesepahaman terkait penanganan penyampaian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari pengadilan Indonesia ke pengadilan di luar negeri dan dari pengadilan luar negeri ke pengadilan di Indonesia. Selain Nota Kesepahaman, telah ditandatangani pula 3 perjanjian kerjasama dan satu Surat Keputusan Bersama pada tanggal 10 September 2018 antara MA dan Kementerian Luar Negeri. Maka, mulai 12 September 2018 seluruh pengadilan wajib mengikuti prosedur yang disepakati.

## **B. VISI DAN MISI**

Visi Pengadilan Negeri Semarang selaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi Pengadilan Negeri Semarang adalah **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Semarang Yang Agung”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Semarang mempunyai misi sebagai berikut:

- ❖ Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Semarang;
- ❖ Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- ❖ Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang;
- ❖ Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang.

## **C. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )**

Rencana Strategis Pengadilan Semarang Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Semarang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah

pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam periode tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Dukungan Manajemen

## *BAB II. KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA, DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU*



## BAB II

### KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA, DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

#### A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

##### 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Semarang tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.A 1.**

NO	SATKER	PERKARA	SISA PERKARA BELUM PUTUS TAHUN 2022	PERKARA MASUK 2023	PERKARA DICABUT	PERKARA YANG DIPUTUS 2023	SISA PERKARA 2023	RASIO PENANGANAN PERKARA (%)	
1	PN. Semarang	PIDANA	Pidana Biasa	4	64	0	61	7	90%
			Pidana Cepat	0	2	0	2	0	100%
			Pidana Anak	0	0	0	0	0	100%
			Pidana Lalu Lintas	0	6031	0	6031	0	100%
		PERDATA	Perdata Gugatan	28	138	14	130	22	86%
			Perdata Permohonan	0	76	4	70	2	100%
			Perdata Gugatan Sederhana	0	2	0	2	0	100%
			Eksekusi	0	3	1	2	1	67%

## 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Adapun jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2023 ditunjukkan pada table berikut:

**Tabel II. A.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2023**

NO	SATKER	PERKARA		SISA PERKARA BELUM PUTUS TAHUN 2022	PERKARA MASUK 2023	PERKARA DICABUT	PERKARA YANG DIPUTUS 2023	SISA PERKARA 2023	RASIO PENANGANAN PERKARA (%)
		PIDANA	PERDATA						
1	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA	PIDANA	Pidana Banding	1	1	0	0	0	-
		PERDATA	Perdata Banding	3	13	0	12	4	36%

## 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023 dapat terlihat pada table berikut:

**Tabel II.A.3 Keadaan Perkara Yang Mengajukan Kasasi Tahun 2023**

NO	SATKER	PERKARA		SISA PERKARA BELUM PUTUS TAHUN 2022	PERKARA MASUK 2023	PERKARA DICABUT	PERKARA YANG DI PUTUS 2023	SISA PERKARA 2023	RASIO PENANGANAN PERKARA (%)
		PIDANA	PERDATA						
1	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA	PIDANA	Pidana Kasasi	1	0	0	0	1	-
		PERDATA	Perdata Kasasi	2	6	0	2	6	25%

## 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada tahun 2023, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dapat terlihat pada tabel berikut:



**Tabel II.A.4. Keadaan Perkara Yang Mengajukan Peninjauan Kembali tahun 2023**

NO	SATKER	PERKARA		SISA PERKARA BELUM PUTUS TAHUN 2022	PERKARA MASUK 2023	PERKARA DICABUT	PERKARA YANG DIPUTUS 2023	SISA PERKARA 2023	RASIO PENANGANAN PERKARA (%)
		PIDANA	Pidana PK						
1	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA	PIDANA	Pidana PK	0	0	0	0	0	-
		PERDATA	Perdata PK	0	3	0	1	0	0%

## B. PENYELESAIAN PERKARA

### 1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Data keadaan perkara selama Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Semarang, dimana terdapat 32 Perkara 2022 yang diputus pada tahun 2023, dapat terlihat pada uraian matriks berikut:

**Tabel II.B.1.**

No	Nama	Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	Keterangan
	Pengadilan Negeri Semarang		
1.	Pidana	4	100%
2.	Pidana Cepat	0	0
3.	Pidana Anak	0	0
4.	Perdata Gugatan	28	100%
5.	Perdata Permohonan	0	100%

### 2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

**Tabel II.B.2.**

No	Nama	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	Keterangan
1.	Pengadilan Negeri Semarang		
	1. Pidana Biasa dan khusus	61	100%
	2. Pidana Cepat	2	100%
	3. Pidana Anak	0	0
	4. Pidana Lalu Lintas	6031	100%
	5. Perdata Gugatan	130	100%
	6. Perdata Permohonan	70	100%

**3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK**

**Tabel II.B.3.**

No	Satker	Perkara	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Ket.
			Banding	Kasasi	PK	
1.	Pengadilan Negeri Semarang	Perdata Gugatan	117	124	130	96%
		Perdata Permohonan	70	70	70	100%
		Pidana Biasa	60	61	61	99,5%
		Pidana Cepat	2	2	2	100%
		Pidana Anak	0	0	0	0

**4. Jumlah perkara Perdata yang berhasil dimediasi**

**Tabel II.B.4.**

No	Satker	Perkara	Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi	Ket.
1.	Pengadilan Negeri Semarang	Perdata	3	2%

**5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi**

**Tabel II.B.5.**

No	Satker	Perkara	Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi	Ket.
1.	Pengadilan Negeri Semarang	Pidana Anak	0	0

### C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

**Tabel II.C.1. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Wilayah Pengadilan Negeri Semarang**

No	Satker	Nilai	Predikat
1.	Pengadilan Negeri Semarang	720	A

Pengadilan Negeri Semarang sebagai salah satu Pelaksana Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi di dalam penyelenggaraan Penegakan Hukum dan Keadilan. Dalam hal ini juga dituntut untuk memberikan Pelayanan Hukum bagi Publik atau khususnya bagi masyarakat Pencari Keadilan dengan lebih baik dan prima.

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Negeri Semarang juga telah melakukan upaya – upaya perbaikan di segala unit. Pengadilan Negeri Semarang terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan atau inovasi – inovasi pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan dengan metode yang taktis dan sistematis.

Sesuai dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan merupakan salah satu pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan memberikan pembaruan atau inovasi dalam sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dimana pelayanan prima harus terus ditingkatkan terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik, antara lain jadwal sidang, layanan informasi di Pengadilan dan pungutan liar.

Pengadilan Negeri Semarang dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang

ada. Di dalam memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan Mutu yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang sudah sesuai standar atau belum. Melalui proses sertifikasi, Pengadilan Negeri Semarang sendiri telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dari Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2018 mendapatkan nilai A Excellent sesuai dengan Sertifikat akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor: TAPM.234/QMR/SERTIFIKAT/3/2021.

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan Desk Eavluation dari KEMENPAN RB untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Negeri Semarang, Namun Pengadilan negeri Semarang belum berhasil lolos sebagai satker penerima predikat WBK

- Posbakum

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Negeri Semarang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, DIPA 03/Satker (099817) Pengadilan Negeri Semarang, pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melakukan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum melalui pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum yang dilaksanakan oleh Advokat / Pengacara Piket setiap hari kerja : Senin – Jum'at jam 09.00 – 11.00 wita di Ruang Posbakum Pengadilan Negeri Semarang.

Pos Pelayanan Hukum dimaksud bertujuan untuk memberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan berupa:

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

**1. Posbakum (satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)**

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Semarang mendapatkan pagu anggaran Posbakum sebesar Rp.24.000.0000,-.

**Tabel II.C.2. Pagu Anggaran Posbakum Pengadilan Negeri Semarang Tahun Anggaran 2023**

NO	SATKER	Rincian Output	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA	Pos Bantuan Hukum	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-	100%

Adapun alokasi anggaran Posbakum dan realisasinya sesuai dengan Tabel :

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1	Belanja Jasa Konsultan Honor advokat pengacara piket	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,

**2. Sidang keliling/pelayanan terpadu**

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan sidang keliling di gedung Zetting platz Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di Pulau Nusa Penida, Anggaran sidang keliling sebesar Rp.40.000.0000,-.

**Tabel II.C.3. Pagu Anggaran Sidang keliling Pengadilan Negeri Semarang Tahun  
Anggaran 2023**

NO	SATKER	Rincian Output	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA	5 perkara	Rp. 40.000.000,-	Rp. 37.500.000,-	93,8%

Adapun alokasi anggaran sidang keliling dan realisasinya sebagai berikut :

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1	Sidang di luar gedung Pengadilan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 37.500.000,-

**2. Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)**

**Tabel II.C.4. Pagu Anggaran Prodeo pada Pengadilan Negeri Semarang Tahun  
Anggaran 2023**

NO	SATKER	Rincian Output	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA	-	-	-	-	

Tahun 2023 Pengadilan Negeri Semarang tidak memperoleh anggaran untuk perkara prodeo. Meskipun Pengadilan Negeri Semarang tidak mendapatkan anggaran perkara prodeo, Pengadilan Negeri Semarang tetap menerima masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara secara prodeo. Namun sampai dengan akhir tahun 2023 tidak ada masyarakat pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya melalui prodeo.

## *BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA*



## BAB III

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### A. SUMBER DAYA MANUSIA

Tuntutan pelayanan publik dewasa ini memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya dan memiliki integritas tinggi. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan baik terhadap sumber daya manusia teknis yudisial maupun sumber daya manusia non teknis yudisial.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Pangkat	Gol/ Ruang	Pendidikan
1.	ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.	Ketua	Hakim Madya Muda	IV/b	Strata I
2.	MULYADI ARIBOWO, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Hakim Madya Muda	IV/b	Strata II
3.	VALERIA FLOSSIE AVILA SANTI, S.H.,M.H.	Hakim	Hakim Pratama Muda	III/b	Strata II
4.	HANIFA FERI KURNIA, S.H.	Hakim	Hakim Pratama Muda	III/b	Strata I
5.	DWI ASRI MUKAROMAH, S.H.	Hakim	Hakim Pratama Muda	III/b	Strata I
6.	JELIKA PRATIWI, S.H.	Hakim	Hakim Pratama Muda	III/b	Strata I
7.	NI NENGAH SUARNINGSIH, S.H.,M.H.	Panitera	Penata Tk. I	III/d	Strata II
8.	SOPIAH, S.H.	Sekretaris	Penata Tk. I	III/d	Strata I
9.	IDA BAGUS MADE SWARJANA NARAPATI, S.H.	Panmud Perdata	Penata Tk. I	III/d	Strata I
10.	NI MADE ARI ARTINI, S.H.	Panmud Hukum	Penata Tk. I	III/d	Strata I
11.	I WAYAN SESANA SAMIARTA, S.T.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penata Tk. I	III/d	Strata I



No	Nama	Jabatan	Pangkat	Gol/ Ruang	Pendidikan
12.	NI KOMANG SERI SUTERISNAWATI, S.H.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata Tk. I	III/d	Strata I
13.	NI LUH PUTU SUTRIANI, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penata	III/c	Strata I
14.	MADE ARIS BUDIARTHA, S.E.,M.A.P.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Penata Tk. I	III/d	Strata II
15.	NI MADE DIAH SAWITRI, S.E.	Pranata APBN	Penata	III/c	Strata I
16.	NI NYOMAN BUDIASIH, S.T.,M.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda Tk. I	III/b	Strata II
17.	YUNITA ANJARDINI, A.Md.	Terampil Arsiparis	Pengatur	II/c	DIII
18.	ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	Strata I
19.	I NENGAH SUMETRO	Panitera Pengganti	Penata	III/c	SLTA
20.	KADEK HENDRA SAPUTRA,SE.SH.	Panitera Pengganti	Penata Tk.I	III/d	Strata I
21.	KADEK KRISNA SINTIA DEWI, SH.MH.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	Strata II
22.	GEDE EKO PRAYUDI,A.Md. SH	Panitera Pengganti	Penata Muda	III/b	Strata I
23.	I KOMANG MERTA ARDIASA, S.E.,S.H.	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	Strata I
24.	PUTU ERIK HENDRAWAN, S.H.,M.Kn.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	III/b	Strata I

No	Nama	Jabatan	Pangkat	Gol/ Ruang	Pendidikan
25.	MARSHA ANGELA PUTRI SEKARINI, SH	Panitera Peng ganti	Penata Muda Tk. I	III/b	Strata I
26.	I GUSTI AGUNG PANJI, SH	Jurusita	Penata Tk. I	III/d	Strata I
27.	I NYOMAN SUARTA, SE.,SH	Jurusita	Penata	III/d	Strata I
28.	I KADEK WIDIANTARA. A.Md	Jurusita	Penata Muda Tk. I	III/b	Diploma III
29.	I PUTU GEDE JULIANTO HERLAMBANG, SH	Jurusita Peng ganti	Penata	III/c	Strata I
30.	NI WAYAN ANIK RISTIANI, A.Md.	Pengelo la Perkara	Pengatur	II/c	DIII
31.	I KETUT SURAWAN	Pengad minis trasi Registra si Perkara Perdata	Pengatur	II/c	SLTA
32.	WIDYA PARAMESWARI RESTA, S.H.	Analisis Perkara Peradi lan	Penata Muda	III/a	Strata I
33.	I MADE AGNI PRABAWA SURYADI, S.H.	Analisis Perkara Peradi lan	Penata Muda	III/a	Strata I
34.	I GUSTI NYOMAN ARTHA DANA	Honorier			
35.	I KETUT BUDIASA	Honorier			
36.	I WAYAN SUDIASA	Honorier			
37.	I NENGAH SETIAWAN	Honorier			
38.	I MADE OKAYANA	Honorier			
39.	I WAYAN KARIANA ANTARA	Honorier			
40.	ADI MURTIYASA	Honorier			
41.	KETUT SURYA DHARMAWAN	Honorier			
42.	PUTU AGUS SUDARSANA	Honorier			

## B. MUTASI

Pelaksanaan mutasi bagi pegawai didasarkan pada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang perubahan atas PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan secara internal dilingkungan Mahkamah Agung RI diatur dalam SK KMA 125 Tahun 2009, pada tahun 2023 ada beberapa kegiatan mutasi sebagai berikut:

Data Alih Tugas/Mutasi Masuk pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Berikut :

No	Nama	Unit Kerja / Jabatan	
		Lama	Baru
<b>VII.</b>	<b>Pengadilan Negeri Semarang</b>		
1	A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.	Ketua PN. Labuan Bajo	Ketua PN. Semarang
2	Mulyadi Aribowo, SH.,MH.	Hakim PN. Pangkal Pinang	Wakil Ketua PN. Semarang
3	Ni Nengah Suarningsih, SH.,MH.	Panitera Muda Pidana PN. Denpasar	Panitera PN. Semarang
4	Sopiah, SH.	Sekretaris PN. Bangli	Sekretaris PN. Semarang
5	Ida Bagus Made Swarjana Narapati, SH.	Panitera Pengganti PN. Denpasar	Panitera Muda Perdata PN. Semarang
6	Putu Erik Hendrawan, SH.,MKn.	Analisis Perkara Peradilan PT.Denpasar	Panitera Pengganti PN. Semarang
7	Marsha Angela Putri Sekarini, SH.	Analisis Perkara Peradilan PN.Denpasar	Panitera Pengganti PN. Semarang

Data Alih Tugas/Mutasi Keluar pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Berikut :

No	Nama	Unit Kerja / Jabatan	
		Lama	Baru
<b>VII.</b>	<b>Pengadilan Negeri Semarang</b>		
1	Ni Made Dewi Sukrani, SH.	Ketua PN. Semarang	Hakim PN. Denpasar
2	Liena, SH.,MHum.	Wakil Ketua PN. Semarang	Ketua PN. Batu Sangkar
3	Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, SH.,MHum.	Hakim PN. Semarang	Hakim PN. Martapura
4	Kadek Dwi Krisna Ananda, SH.,MKn.	Hakim PN. Semarang	Hakim PN. Bangkalan
5	I Nyoman Sudarsana, SH.	Panitera PN. Semarang	Panitera PN. Kraksaan
6	Desak Ketut Metriani, SH.	Sekretaris PN. Semarang	Sekretaris PN. Amlapura

7	Made Ari Kurniawan, SH.	Panitera Muda Perdata PN. Semarang	Panitera Muda Perdata PN. Gianyar
8	Frans Sisca Nurhayati, SE.MH.	Panitera Pengganti PN. Semarang	Panitera Pengganti PN. Cikarang
9	Rahma Seviana Pratami, ST.	Pranata Komputer Ahli Pertama PN. Semarang	Pranata Komputer Ahli Pertama PN. Purwokerto

### C. PROMOSI

Mekanisme pengangkatan dalam Jabatan Struktural didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Perka BKN Nomor 13 Tahun 2002, untuk pengangkatan dalam jabatan Hakim Ketua / Wakil Ketua didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002. Sedangkan untuk tenaga teknis peradilan mengacu pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.

Mengacu dengan ketentuan diatas maka pada tahun 2023 ada kegiatan promosi dengan tabel sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Usulan Jabatan
<b>VII.</b>	<b>Pengadilan Negeri Semarang</b>		
1	Made Aris Budiarta, SE.,MAP.	Kasub. Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan PN.Semarang	Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN PN.Semarang
2	Ni Luh Putu Sutriani, SH.	Penyusun Laporan Keuangan PN.Semarang	Kasub. Bag. Umum Keuangan PN.Semarang

#### D. PENSIUN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 012/Sek/01/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 perihal batas usia pensiun Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti serta Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka untuk Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Semarang yang memasuki masa Purna Bhakti / Pensiun sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Gol/ruang	TMT Pensiun
VII.	Pengadilan Negeri Semarang			
-	-	-	-	-

#### E. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Selama periode Januari s.d. 31 Desember 2023 terdapat beberapa orang Hakim dan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Adapun rincian nama-nama Hakim dan Pegawai yang mengikuti diklat tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat
1	Ni Made Dewi Sukrani, SH.	Ketua	1. Pelatihan Integratif SPIP Angkatan I dan II wilayah Bali (21 sd 27 Mei 2023) 2. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana (9 Agustus 2023)
2	Kadek Dwi Krisna Ananda, SH.,MH.	Hakim	1. Pelatihan hakim berkelanjutan I (CJE 1) Peradilan Umum di Seluruh Indonesia (30 januari sd 3 Februari 2023) 2. Sosialisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (25 Mei 2023) 3. FGD Lembaga Penjamin Simpanan (22 sd 24 Juni 2023)

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat
			4. Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada sektor kelembagaan (22 Agustus 2023)
3	Valeria Flossie Avila Santi, SH.,MH.	Hakim	FGD Lembaga Penjamin Simpanan (22 sd 24 Juni 2023)
4	Jelika Pratiwi, SH.	Hakim	Pelatihan bersama aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan angkatan II (22 sd 29 Juli 2023)
5	Ni Nengah Suarningsih, SH.,MH.	Panitera	1. Penyusunan modul pimpinan Pengadilan, Sekretaris Pengadilan dan manajemen kepaniteraan (25 sd 27 September 2023) 2. Bimtek pengembangan kompetensi ASN dalam Peningkatan Kinerja Layanan Peradilan Tahun 2023
6	Sopiah, SH.	Sekretaris	Pelatihan Integratif SPIP Angkatan I dan II wilayah Bali (21 sd 27 Mei 2023)
7	Ni Made Ari Artini, SH.	Panmud Hukum	1. Pelatihan Integratif SPIP Angkatan I dan II wilayah Bali (21 sd 27 Mei 2023) 2. Pengelolaan Arsip Pejabat Negara dan Arsip Perkara Tahun Anggaran 2023 (25 sd 27 Oktober 2023)
8	Ni Komang Seri Suterisnawati, SH.	Kasub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	1. Pelatihan Integratif SPIP Angkatan I dan II wilayah Bali (21 sd 27 Mei 2023) 2. Bimtek pengembangan kompetensi ASN dalam Peningkatan Kinerja Layanan Peradilan Tahun 2023 (16 sd 18 Oktober 2023) 3. Pengelolaan Arsip Pejabat Negara dan Arsip Perkara Tahun Anggaran 2023 (25 sd 27 Oktober 2023)
9	I Wayan Sesana Samiarta, ST	Kasub. Bag. Kepegawaian Ortala / PPK	1. Bimbingan Teknis dan Asistensi Aplikasi SAKTI Tentang Pemutakhiran Halaman III DIPA (27 Juni 2023) 2. Bimtek pada Aplikasi SAKTI (31 Juli 2023)

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat
			3. Bimtek pengembangan kompetensi ASN dalam Peningkatan Kinerja Layanan Peradilan Tahun 2023 (16 sd 18 Oktober 2023)
10	Made Aris Budiarta, SE.,MAP.	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN	<p>1. Bimbingan Teknis dan Asistensi Aplikasi SAKTI Tentang Pemutakhiran Halaman III DIPA (27 Juni 2023)</p> <p>2. Pelatihan Integratif SPIP Angkatan I dan II wilayah Bali (21 sd 27 Mei 2023)</p> <p>3. Inventarisasi Data BMN dan Keuangan (22 sd 24 Agustus 2023)</p> <p>4. Bimtek pengembangan kompetensi ASN dalam Peningkatan Kinerja Layanan Peradilan Tahun 2023 (16 sd 18 Oktober 2023)</p> <p>5. Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Level I</p>
11	Ni Nyoman Budiasih, ST.,MT.	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Level I
12	Kadek Hendra Saputra, SE.,SH.	Panitera Pengganti	pelatihan teknis yudisial panitera panitera pengganti (31 Juli sd 5 Agustus 2023)
13	I Komang Merta Ardiasa, SE.,SH.	Panitera Pengganti	pelatihan teknis yudisial panitera panitera pengganti (31 Juli sd 5 Agustus 2023)
14	I Nyoman Suarta, SE.,SH.	Jurusita / Operator SIMAK BMN	<p>1. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara Pengukuran Tingkat Kesesuaian SBSK dan Implementasi Evaluasi Portofolio BMN Tahun 2023</p> <p>2. Inventarisasi Data BMN dan Keuangan (22 sd 24 Agustus 2023)</p>
15	Ni Luh Putu Sutriani, SH	Kasub. Bag. Umum Keuangan	Asistensi penyusunan laporan keuangan

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat
16	Ni Made Diah Sawitri, SE	Fungsional Pranata Keuangan APBN	1. Asistensi dan evaluasi penggunaan aplikasi SAKTI tentang pencatatan TKDN  2. Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Level I
17	Yunita Anjardini, A.Md.	Fungsional Terampil Arsiparis	Inventarisasi Data BMN dan Keuangan (22 sd 24 Agustus 2023)
18	I Made Agni Prabawa Suryadi, SH.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan kepemimpinan dasar kader bela negara (11 sd 19 September 2023)





*BAB IV. PENGELOLAAN  
KEUANGAN, SARANA DAN  
PRASARANA, DAN  
TEKNOLOGI INFORMASI*



## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

#### **A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Pengadilan Negeri Semarang dalam tahun 2023 melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersumber dari dua DIPA yaitu DIPA dari Eselon I Sekretariat Mahkamah Agung dengan kode 005.01.099816 dan DIPA dari Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan kode 005.03.099817.

##### **a. Program Dukungan Manajemen**

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarang dengan kode satker 099816 memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.710.742.000,- dimana pada tahun 2023 terdapat pengurangan Pagu dimana terdapat belanja Pegawai (akun 51) sebesar Rp. 250.000.000 sehingga Pagu DIPA 005.01.099816 Menjadi Rp. 5.460.742.000,- dan telah melakukan revisi sebanyak 6 (Enam) kali terdiri dari :

- Belanja Barang Non Operasional Satker Daerah Rp. 7.008.000,-
- Belanja Gaji dan Tunjangan Dari Rp. 3.970.024.000,- Menjadi Rp. 3.720.024.000
- Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan kantor Rp. 1.733.710.000,- yang terdiri dari ;
  - a. Belanja Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran Rp. 408.135.000,- untuk langganan koran, keperluan sehari – hari perkantoran/ ATK, honorarium tenaga kontrak (pramubakti, satpam dan supir);
  - b. Belanja Langganan Daya dan jasa meliputi langganan internet, web hosting, pengiriman surat dinas, langganan listrik, telepon, dan air Rp. 203.412.000,-
  - c. Belanja Pemeliharaan kantor meliputi pemeliharaan gedung dan halaman kantor, rumah dinas, jaringan telepon, listrik, internet serta pemeliharaan peralatan dan mesin Rp. 779.464.000,-,

- d. Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor meliputi honor operasional satker, belanja pakaian kerja honorer dan pegawai Rp. 120.738.000,-
  - e. Bantuan Sewa Rumah Dinas yaitu biaya sewa rumah dinas hakim Rp. 68.040.000,-
  - f. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Rp. 5.600.000,-
  - g. Rapat koordinasi internal Rp. 11.275.000,-
  - h. Belanja perjalanan dinas untuk konsultasi ke tingkat banding dan perjalanan dinas dalam kota Rp. 48.726.000,-
  - i. Belanja perjalanan dinas untuk konsultasi Ke KPPN/ KPKNL/ Kanwil DjPb sebesar Rp. 15.660.000,-
  - j. Belanja operasional penanggulangan covid-19 sebesar Rp. 14.400.000,-
- b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarang dengan kode satker 099817 memperoleh anggaran sebesar Rp. 199.605.000,- pada tahun 2023, dan telah melakukan revisi DIPA sebanyak 5 (lima) kali dengan pagu tetap yang terdiri dari:
- Belanja Percepatan Penyelesaian Perkara yang terdiri dari Belanja perjalanan dinas dalam kota (Hakim wasmat) sebesar Rp. 1.500.000,-
  - Belanja untuk penyelesaian perkara pidana di tingkat pertama Rp. 32.450.000,- terdiri dari:
    - Pendaftaran Berkas Perkara Rp. 13.310.000,-
    - Penetapan hari sidang Rp. 2.550.000,-
    - Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan Rp. 3.000.000,-
    - Pemeriksaan di sidang Pengadilan Rp. 7.050.000,-
    - Pengiriman petikan/ salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa Rp. 3.850.000,-
    - Minutasi/ upaya hukum Rp. 2.250.000,-
    - Penanganan Perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama Rp. 220.000,-
    - Penanganan perkara Kasasi, PK di Pengadilan Tingkat Pertama Rp. 220.000,-
    - Belanja Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum Rp. 24.000.000,-

- Belanja sidang di luar gedung pengadilan sebesar Rp. 40.000.000,- untuk belanja perjalanan dinas dalam kota.

#### A.1. DIPA 01 BUA

**Tabel IV.A.1.1 Perbandingan Pengelolaan Anggaran  
Tahun 2022 dan Tahun 2023 wilayah PT. Denpasar**

NO	TAHUN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	2022	6.016.472.000	6.004.039.104	99,79%
2	2023	5.460.742.000	5.426.092.921	99,37%

**IV.A.1.2 Tabel Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Anggaran DIPA 01  
Tahun 2023 wilayah PT. Denpasar**

NO	TAHUN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	Belanja Pegawai	3.720.024.000	3.709.252.451	99,71%
2	Belanja Barang	1.740.718.000	1.716.840.470	98,63%
3	Belanja Modal	0	0	-

**IV.A.1.3 Tabel Pengelolaan PNBPN wilayah PT. Denpasar**

NO	AKUN	URAIAN	TARGET PNBPN (RP)	TOTAL PENERIMAAN PNBPN (%)
1	425131	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	Rp. 11.004.000	Rp. 9.043.981 (82,19%)

**IV.A.1.4. Tabel Capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran**

**Tahun 2023 wilayah PT. Denpasar**

NO	KET.	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANA ANGGARAN						NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHR
		REVISI DIPA	DEVIASI HAL III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	NILAI	100	100	99,91	100	100	99,92	100	100	99,97	100%	99,97
2	BOBOT	10	10	20	10	10	10	5	25			
3	NILAI AKHIR	10	10	19,98	10	10	9,99	5	25			
	NILAI ASPEK	100		99,97								

**IV.A.1.5. Tabel Catatan Revisi atas DIPA 01  
Tahun 2023 wilayah PT. Denpasar**

NO	PAGU	TANGGAL TERBIT REVISI	NILAI PAGU REVISI (dalam Rp.)	KETERANGAN
1	Pagu Awal	17 November 2022	5.710.742.000	
2	Revisi ke-01	13 Februari 2023	5.710.742.000	
3	Revisi ke-02	11 April 2023	5.710.742.000	
4	Revisi ke-03	11 Juli 2023	5.710.742.000	
5	Revisi ke-04	17 Oktober 2023	5.460.742.000	
6	Revisi ke-05	27 November 2023	5.460.742.000	
7	Revisi ke-06	11 Desember 2023	5.460.742.000	
8	Revisi ke-07	21 Desember 2023	5.460.742.000	

## A.2. DIPA 03 BADILUM

### IV.A.2.1 Tabel Perbandingan Pengelolaan Anggaran DIPA 03 Tahun 2022 dan Tahun 2023 wilayah PT. Denpasar

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2022	134.605.000	134.116.750	99,64%
2	2023	97.950.000	95.199.360	97,19%

### IV.A.2.2 Tabel Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2023

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	PN Semarang (sumber data : <a href="http://spanint.kemenkeu.go.id">spanint.kemenkeu.go.id</a> )			
	Belanja Pegawai	-	-	-
	Belanja Barang	97.950.000	95.199.360	97,19%
	Belanja Modal	-	-	-

### IV.A.2.3 Tabel Pengelolaan PNPB DIPA 03

NO	AKUN	URAIAN	TARGET PNPB (RP)	TOTAL PENERIMAAN PNPB (%)
1	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	3.530.000	3.260.000 (92,3%)

NO	AKUN	URAIAN	TARGET PNBP (RP)	TOTAL PENERIMAAN PNBP (%)
2	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	10.230.000	10.430.000 (101,95%)
3	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	17.913.000	22.957.000 (128,15%)
4	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 6.270.000	Rp. 9.140.000 (145,77%)
5	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 11.622.000	Rp. 17.636.500 (151,77%)

#### IV.A.2.4. Tabel Capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran DIPA 03

NO	KET.	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANA ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELASANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHR
		REVISI DIPA	DEVIASI HAL III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	NILAI	100	100	100	0	0	99,86	100	100	79,99	80%	99,98
2	BOBOT	10	10	20	0	0	10	5	25			
3	NILAI AKHIR	10	10	20	0	0	9,99	5	25			
4	NILAI ASPEK	100		99,95					100			

#### IV.A.2.5. Tabel Catatan Revisi atas DIPA 03 Tahun 2023

NO	PAGU	TANGGAL TERBIT REVISI	NILAI PAGU REVISI (dalam Rp.)	KETERANGAN
1	Pagu Awal	18 November 2022	97.950.000	

2	Revisi ke - 1	13 Februari 2023	97.950.000	
3	Revisi ke - 2	11 April 2023	97.950.000	
4	Revisi ke - 3	11 Juli 2023	97.950.000	
5	Revisi ke - 4	10 Oktober 2023	97.950.000	
6	Revisi ke - 5	31 Oktober 2023	97.950.000	
7	Revisi ke - 6	21 Desember 2023	97.950.000	

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Semarang yang juga memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola Barang Milik Negara melakukan beberapa pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan.

### a) Pengadaan.

Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Semarang Tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Belanja Modal

### b) Pemeliharaan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung pada Pengadilan Negeri Semarang.

### IV.B.1. Inventarisasi Tanah dan Bangunan Tahun 2023

NO	NAMA BARANG	N U P	TGL PEROLE HAN	LUAS (M2)	NILAI	STATUS	KON DISI	BUKTI KEPEM ILIKAN	ATAS NAMA	LOKASI	KET.
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	31 Desember 1984	400	1.586.000.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Jl. Raya Akah Gang Bangau	
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2	31 Desember 1982	600	2.409.000.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Jl. Gajah Mada Gang Dahlia	
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3	31 Desember 1979	200	680.400.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q	Jl Gajah Mada No 59	



NO	NAMA BARANG	NUP	TGL PEROLEHAN	LUAS (M2)	NILAI	STATUS	KONDISI	BUKTI KEPEMILIKAN	ATAS NAMA	LOKASI	KET.
									Kementerian/ Lembaga	Semarapura	
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4	31 Desember 1976	250	1.086.250.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Jl. Patimura No 24 Semarang	
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	31 Desember 1977	2.000	8.748.000.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Jl. Gajah Mada No. 59 Semarang	
6	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1	31 Desember 1977	500	2.350.625.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Jalan Raya Nusa Penida	

#### IV.B.2. INVENTARISASI ALAT ANGKUTAN

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman)

NO	NAMA BARANG	NUP	TGL PEROLEHAN	MERK/TYPE	NILAI	KONDISI	NO. MESIN	NO. RANGKA	NO. POLISI	PENGUSAHAAN	JABATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Station Wagon	1	31 Desember 2003	TOYOTA KIJANG KF 83	100.932.000	Baik	7K-0596507	MHF11KF8330077821	DK 1166 M	Ni Nengah Suarningsih, SH	Panitera
2	Station Wagon	3	23 Juni 2008	TOYOTA INNOVA	163.915.734	Baik	1TR-6547267	MHF41G980028038	DK 1280 M	Sopiah, SH.	Sekretaris
3	Station Wagon	4	12 Mei 2022	Toyota Avanza 1,5 G CVT Minibus	280.800.000	Baik	2NRG812634	MHKAB1BY3NK019456	DK 1309 M	Mulyadi Aribowo, SH., MH.	Wakil Ketua
4	Sepeda Motor	1	31 Desember 2003	HONDA - C100/ SUPRA X	6.100.000	Baik	KEVAE-1335343	MH1KEVA173K335371	DK 2444 M	Ni Nyoman Budiasih	Staf
5	Sepeda Motor	2	31 Desember 1997	HONDA - C100/ GRAND	4.550.000	Rusak Berat	NFGEI691745	MH1NFG00VVK694739	DK 2004 M	-	-
6	Sepeda Motor	4	31 Desember 2006	HONDA SUPRA 125 D	11.864.500	Baik	JB51E-1244809	MH1JB51165K240260	DK 2441M	Yunita Anjardini, A.Md	Staf
7	Sepeda Motor	5	31 Desember 2006	HONDA SUPRA X125	11.864.500	Baik	JB51E1404838	MH1JB51165K401979	DK 2442 M	Made Aris Budiarta, SE, MAP	Staf
8	Sepeda Motor	6	16 Mei 2007	HONDA VARIO 110	13.400.000	Baik	JF11E-1028853	MH1JF11197K029005	DK 2776 M	Ni Made Diah Sawitri, SE	Staf
9	Sepeda Motor	7	01 Juli 2008	HONDA NF 125 TR	14.824.000	Baik	JB91E-1315906	MH1JB91168K315888	DK 2869 M	Ni Made Ari Artini, SH	Panmud Hukum
10	Sepeda Motor	8	01 Juli 2008	HONDA NF 125 TR	14.824.000	Baik	JB91E-1316029	MH1JB91158K315851	DK 2870 M	Ni Komang Seri Suterisnawati	Kasubbag PTIP
11	Sepeda Motor	9	01 Juli 2008	HONDA NF 125 TR	14.824.000	Baik	JB91E-1315930	MH1JB91108K315899	DK 2871 M	Kadek Hendra Saputra, SH.	Plt. Panmud Pidana

NO	NAMA BARANG	NUP	TGL PEROLEHAN	MERK/ TYPE	NILAI	KON DISI	NO. MESIN	NO. RANGKA	NO. POLISI	PENGUSAHAAN	JABATAN
12	Sepeda Motor	10	31 Desember 2001	HONDA NF 100	10.000.000	Rusak Berat	KEV4E-1212087	MH11KEV4181K211411	DK 2555 M	-	-
13	Sepeda Motor	11	25 Mei 2009	Honda supra x Nf 125	15.272.000	Baik	JB9IE-1700041	MH1JB91129K703668	DK 4000 M	Ida Bagus Made Swarjana, SH.	Panmud Perdata
14	Sepeda Motor	12	16 Desember 2011	Honda NF 125 TR M/T	16.370.000	Baik	JBIE2855236	MH1JB9124BK864540	DK 4004 M	I Wayan Sesana Samiarta, ST.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

#### IV.B.3. Inventarisasi Daftar Barang Ruangan

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman)

NO	NAMA BARANG	TGL PEROLEHAN (Total Unit)		KONDISI (Total Unit)					
		>=10 TAHUN	<=10 TAHUN	BAIK		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
				>=10 TAHUN	<=10 TAHUN	>=10 TAHUN	<=10 TAHUN	>=10 TAHUN	<=10 TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NON TIK								
	A.C. Split	14	18	14	18				
	A.C. Window		1		1				
	Amplifier		1		1				
	Audio Amplifier		2		2				
	Audio Mixing Console		1		1				
	Bangku Panjang Kayu	16		16					
	Bracket Standing Peralatan		1		1				
	Brandkas		5		5				
	Buffet	5		5					
	Cable	5		5					
	Camera Conference		1		1				
	Camera Video		1		1				
	CCTV – Camera Control Television System		6		6				
	Dispenser	1		1					
	Display	1		1					
	Facsimile	1		1					
	Filling Cabinet Kayu		2		2				
	Filling Cabinet Besi	8		8					
	Finger Printer Time & Attendance	1	1	1	1				
	Focusing Screen/Layar LCD Proyektor		1		1				
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4		4					
	Hand Metal Detector	2		2					
	Jam Elektronik	7	1	7	1				
	Jam Mekanis	1		1					
	Kabel Roll	1		1					
	Karaoke	1		1					
	Kipas Angin	2		2					
	Kursi Besi/Metal	142	57	136	57			6	
	Kursi Kayu	64	14	63	14			1	

NO	NAMA BARANG	TGL PEROLEHAN (Total Unit)		KONDISI (Total Unit)					
		>=10 TAHUN	<=10 TAHUN	BAIK		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
				>=10 TAHUN	<=10 TAHUN	>=10 TAHUN	<=10 TAHUN	>=10 TAHUN	<=10 TAHUN
	Lambang Garuda Pancasila	8		8					
	Lambang Instansi	2		2					
	LCD Monitor		1		1				
	LCD Proyektor		2		2				
	Lemari Besi/Metal	6		6					
	Lemari Kayu	28	4	28	4				
	Loudspeaker	4	23	4	23				
	Meja Kerja Kayu	103	17	97	17	4		2	
	Meja Komputer		11		11				
	Meja Resepsionis		2		2				
	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27) Inci	1		1					
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13) Inci	2		2					
	Meubelair Lainnya	2	3	2	3				
	Microphone		8		8				
	Meja Telephone	12		12					
	Microphone Table Stand		2		2				
	Microphone/ Wireless Mic		1		1				
	Mimbar/Podium	1		1					
	Mixer Sound System		1		1				
	Nakas		9		9				
	Palu Sidang	4		4					
	Papan Visual/Papan Nama	39		39					
	Perkakas Kantor Lainnya	15	1	15	1				
	Pesawat Telephone	1		1					
	Peta	3		3					
	Pintu Elektrik (Yang Memakai Akses)		5		5				
	Rak Besi	7		7					
	Rak kayu	17	1	16	1			1	
	Sice	13	2	12	2			1	
	Sound System	2	1	2	1				
	Stabilisator	5		5					
	Tabung Pemadam Api	2	2	2	2				
	Telephone (PABX)	12		12					
	Televisi		16		16				
	Tiang Bendera	3		3					
	Uninterruptible Power Suplly (UPS)	2	7	2	7				
	Vertikal Blind		32		32				
	<b>KHUSUS TIK</b>								
	Internet	1		1					
	Komputer Jaringan Lainnya		2		2				
	Laptop	11	27	11	27				
	Notebook	1		1					

NO	NAMA BARANG	TGL PEROLEHAN (Total Unit)		KONDISI (Total Unit)					
		>=10 TAHUN	<=10 TAHUN	BAIK		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
				>=10 TAHUN	<=10 TAHUN	>=10 TAHUN	<=10 TAHUN	>=10 TAHUN	<=10 TAHUN
	P.C. Unit	14	39	2	34	12			5
	Personal Komputer Lainnya	1	1						
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	23	14	23				
	Rak Server		1		1				
	Router		1		1				
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	15	1	15				
	Server	1	3	1	3				
	Tablet PC		7		7				

#### IV.B.4. TABEL TATA RUANG PENGADILAN

No.	Sarana Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
<b>VII.</b>	<b>Pengadilan Negeri Semarang</b>		
<b>A</b>	<b>Sarana Prasarana Gedung</b>		
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	1	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang	2	Baik
7	Ruang Sidang Anak	1	Baik
8	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Baik
9	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Baik
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Baik
11	Ruang Umum dan Keuangan	1	Baik
12	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	Baik
13	Ruang Kepegawaian, Ortala	1	Baik
14	Ruang PP dan Juru Sita	1	Baik
15	Ruang Media Center	1	Baik
16	Ruang Rapat	1	Baik
17	Ruang Posbakum	1	Baik
18	Ruang Arsip Kesekretariatan	1	Baik
19	Ruang Arsip Perkara	1	Baik
20	Ruang penyimpanan Register	1	Baik
21	Ruang Kesehatan dan Laktasi	1	Baik
22	Ruang Server	1	Baik
23	Pantry	1	Baik
24	Toilet	6	Baik
25	Ruang tahanan pria	1	Baik
26	Ruang tahanan wanita	1	Baik
27	Ruang Tunggu anak, Ruang Bapas, Ruang Jaksa	1	Baik
28	Ruang mediasi, R. kaukus dan R Aanmaning	1	Baik

29	Ruang Diversi, R. Teleconference, R Peksos	1	Baik
30	Ruang perpustakaan	1	Baik
31	Musholla	1	Baik
32	Tempat Ibadah Umat Hindu	1	Baik
33	Aula/ Ruang Tamu Terbuka	1	Baik
34	Area Ramah Anak/Ruang Bermain Anak	1	Baik
35	Ruang Tunggu sidang	1	Baik
36	Lobby/ PTSP	1	Baik
37	Gudang	1	Baik
38	Ruang Teleconferance dan R Kaukus	1	Baik
39	Ruang Jaksa, Bapas, Peksos	1	Baik

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

### 1. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum

Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau yang disebut dengan e-court telah memberikan dampak langsung bagi praktik Advokat di Indonesia. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan e-court menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (*advokat*). Advokat diharuskan untuk memiliki akun resmi dengan mendaftar dalam sistem e-court sehingga keberadaannya diakui secara formil. Namun, para advokat yang tidak memiliki akun e-court akan menjadi terhalang ketika membela klien di sejumlah pengadilan, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi:

Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi. Selain itu, sistem e-court juga dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Negeri Semarang sudah sampai pendaftaran perkara melalui user pengguna lain, selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Semarang sebanyak 209 Perkara yang terdiri dari 129 perkara gugatan dari 80 Perkara Permohonan yang masuk ke Pengadilan Negeri Semarang.

Pengadilan Negeri Semarang sudah menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan *e-Court* seperti adanya pojok *e-Court* diaman bertujuan untuk membantu pendaftaran user *e-Court*, dan menyediakan Scanner untuk Pelaksanaan *e-Summons* dan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) untuk memudahkan pembayaran sehingga tidak perlu lagi keluar dari kantor Pengadilan Negeri Semarang.

NO	PENDAFTARAN/ UPAYA HUKUM	PN.SEMARAPURA
1	2	3
2	GUGATAN	138
3	BANTAHAN	0
4	GUGATAN SEDERHANA	2
5	PERMOHONAN	75
6	PERMOHONAN KONSINYASI	0
7	PEMBATALAN ARBITRASE	0
8	BANDING ONLINE	4
9	VERZET	0

## 2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

Pelaksanaan SIPP pada Pengadilan Negeri Semarang sudah berjalan dengan baik, dimana Pengadilan Negeri Semarang terus berada di peringkat teratas dalam aplikasi monitoring Implementasi SIPP. Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Semarang telah menggunakan SIPP 5.0.0. Pelaksanaan SIPP sudah di dukung dengan fasilitas layanan internet sebesar 100Mbps dan didukung jaringan internet menggunakan LAN dan Wireless.

#### IV.C.2. TABEL STATISTIK PERKARA

NO	PERKARA	PN. SEMARAPURA
<b>PERDATA</b>		
1	Belum Proses	0
2	Sisa Perkara	30
3	Masuk Perkara	200
4	Putus Perkara	202
5	Sisa Akhir Perkara	28
6	Rasio Penanganan Perkara	87,83%
<b>PIDANA BIASA</b>		
1	Belum Proses	0
2	Sisa Perkara	4
3	Masuk Perkara	6097
4	Putus Perkara	6094
5	Sisa Akhir Perkara	7
6	Rasio Penanganan Perkara	99,88%
<b>PIDANA TIPIKOR</b>		
1	Belum Proses	0
2	Sisa Perkara	0
3	Masuk Perkara	0
4	Putus Perkara	0
5	Sisa Akhir Perkara	0
6	Rasio Penanganan Perkara	0%
<b>PIDANA ANAK</b>		
1	Belum Proses	0
2	Sisa Perkara	0
3	Masuk Perkara	0
4	Putus Perkara	0
5	Sisa Akhir Perkara	0
6	Rasio Penanganan Perkara	0%

#### IV.C.3. TABEL PERSENTASE KINERJA HAKIM

NO	NAMA HAKIM	STATISTIK					
		SISA LALU	DITERI-MAKAN	BEBAN	PUTUS	SISA AKHIR	RASIO
1	Ni Made Dewi Sukrani	18	72	90	90	0	100%
2	Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.	11	65	76	76	0	100%
3	Pulung Yustisia Dewi, Sh., M.H.	1	0	1	1	0	100%
4	Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.	12	64	76	76	0	100%
5	Liena	14	111	125	125	0	100%
6	Anak Agung Ayu Dharma Yanthi	13	68	81	81	0	100%
7	Jelika Pratiwi	20	138	158	130	28	82,28%
8	Dwi Asri Mukaromah, S.H.	16	141	157	126	31	80,25%
9	Hanifa Feri Kurnia, S.H.	3	134	137	108	29	78,83%
10	Mulyadi Aribowo	0	1	1	0	1	0 %
11	A.A. Sagung Yuni Wulantrisna	0	0	0	0	0	0%

#### IV.C.4. TABEL PERSENTASE KINERJA PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA PANITERA PENGGANTI	STATISTIK					
		SISA LALU	MASUK	BEBAN	MINUTASI	SISA AKHIR	RASIO
1	Ida Bagus Made Swarjana Narapati	0	1	1	1	0	100.00%
2	Ni Nengah Suarningsih	0	32	32	32	0	100.00%
3	Rupiah, S.Sos, S.H	2	0	2	2	0	100.00%
4	A. A. Raka Endrawati, S.H.	3	37	40	37	3	92.50%
5	Kadek Hendra Saputra, S.E, S.H.	4	39	43	39	4	90.70%
6	I Komang Merta Ardiasa	5	46	51	46	5	90.20%
7	Putu Erik Hendrawan	0	28	28	25	3	89.29%
8	Kadek Krisna Sintia Dewi	4	42	46	41	5	89.13%
9	Ni Made Ari Artini, Sh	1	17	18	16	2	88.89%
10	I Nengah Sumetro	4	20	24	21	3	87.50%
11	Gede Eko Prayudi	6	39	45	39	6	86.67%
12	Rupiah, S.Sos, S.H.	0	0	0	0	0	0%



# *BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK*



## **BAB V.**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

Pengadilan Negeri Semarang sebagai salah satu Pelaksana Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi di dalam penyelenggaraan Penegakan Hukum dan Keadilan. Dalam hal ini juga dituntut untuk memberikan Pelayanan Hukum bagi Publik atau khususnya bagi masyarakat Pencari Keadilan dengan lebih baik dan prima

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Negeri Semarang juga telah melakukan upaya – upaya perbaikan di segala unit. Pengadilan Negeri Semarang terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan atau inovasi – inovasi pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan dengan metode yang taktis dan sistematis.

Sesuai dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan merupakan salah satu pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan memberikan pembaruan atau inovasi dalam sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Paradilan dimanapelayanan prima harus terus ditingkatkan terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik, antara lain jadwal sidang, layanan informasi di Pengadilan dan pungutan liar.

Pengadilan Negeri Semarang dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada. Di dalam memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan Mutu yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang sudah sesuai standar atau belum. Melalui proses sertifikasi, Pengadilan Negeri Semarang sendiri telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dari Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2022 mendapatkan nilai A Excellent. Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan secara berkala sebanyak 1 (satu) kali Asesmen oleh Pengadilan Tinggi Denpasar.

## **B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dengan tujuan dimana pelayanan akan dilaksanakan di meja pelayanan yang disediakan di lobby Pengadilan Negeri Semarang. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Semarang telah mendapatkan juara II untuk Pengadilan Negeri Kelas II sesuai dengan Piagam Penghargaan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 18/PIAGAM PTSP/PN/2018

Untuk memudahkan pelayanan, maka pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) meja pelayanan, yaitu :

- a. Meja pelayanan Kepaniteraan Hukum : melayani semua jenis layanan bidang hukum seperti pendaftaran CV, melayani pengaduan dari masyarakat baik dari para pencari keadilan atau pihak yang berperkara maupun dari customer focus dll.;
- b. Meja pelayanan Kepaniteraan Perdata dan Meja Kasir : melayani semua jenis pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara perdata dan;
- c. Meja pelayanan Kepaniteraan Pidana: melayani semua jenis pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara perkara tindak pidana;
- d. Meja pelayanan Tata Usaha dan Keuangan : melayani penerimaan surat masuk, penerimaan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi, dan lain-lain;

- e. Pojok e-Court : mempunyai kewenangan untuk menerima pendaftaran user e-Court untuk pengguna lain.
- f. Meja Help Desk : melayani masyarakat yang memerlukan informasi dan pendaftaran antran siding para pengguna pengadilan yang akan melakukan persidangan.

Pengadilan Negeri Semarang telah meningkatkan pelayanan di PTSP dengan menyediakan sarana penunjang untuk para pencari keadilan dengan kebutuhan khusus seperti guiding block, ramp disabilitas, dan petunjuk yang menggunakan huruf *brielle*.  
Tampilan Pelayanan PTSP Pada Pengadilan Negeri Semarang.



### C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK


Pengadilan Negeri Semarang telah memiliki beberapa Inovasi yang lebih mengedepankan Teknologi Informasi, dengan maksud memudahkan Pengguna Pengadilan maupun seluruh karyawan Pengadilan Negeri Semarang untuk mendapatkan pelayanan.

Adapun Inovasi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Semarang, antara lain :

- a. Aplikasi Semarang smart service “3s”
- b. Aplikasi sipepi (sistem pengelolaan perangkat teknologi informasi)

- c. Aplikasi asikk (aplikasi izin keluar kantor)
- d. Anjungan layanan mandiri
- e. Co-working space
- f. Panggilan sidang
- g. Mesin antrean PTSP
- h. Aplikasi Surat Tugas

**Tabel V.4.1. Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik  
Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2023**

NO	NAMA INOVASI	URAIAN INOVASI	LATAR BELAKANG GAGASAN INOVASI	PENGGUNA INOVASI	PENGHARGAAN	TAMPILAN INOVASI
1	2	3	4	5	6	7
1	SIPEPI (Aplikasi pengelolaan perangkat teknologi informasi)	semua perangkat teknologi yang berada dimasing-masing ruangan pada Pengadilan Negeri Semarang tercatat pada Aplikasi SIPEPI, yang nantinya jika salah satu dari perangkat tersebut mengalami gangguan, maka Staf atau Pegawai hanya perlu menggunakan aplikasi ini untuk melaporkan	Adanya kendala saat suatu perangkat mengalami gangguan, diperlukan catatan yang lengkap mengenai waktu pengaduan, penyelesaian dan kondisi perangkat.	Aparatur Pada Pengadilan Negeri Semarang		

NO	NAMA INOVASI	URAIAN INOVASI	LATAR BELAKANG GAGASAN INOVASI	PENGGUNA INOVASI	PENGHARGAAN	TAMPILAN INOVASI
		kendala pada perangkat yang mengalami gangguan tersebut dan nantinya akan ditindak lanjuti oleh Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP)				
2	ASIKK (Aplikasi Surat Izin Keluar Kantor)	Sebelum adanya Aplikasi ASIKK, seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Semarang menggunakan Surat Izin Keluar secara Manual dengan mengambil Form di Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, namun dengan telah adanya Aplikasi	Kesulitan Pegawai Pengadilan Negeri Semarang dalam menggunakan Surat Izin Keluar secara Manual dengan mengambil Form di Bagian Kepegawaian	Aparatur Pada Pengadilan Negeri Semarang		

NO	NAMA INOVASI	URAIAN INOVASI	LATAR BELAKANG GAGASAN INOVASI	PENGGUNA INOVASI	PENGHARGAAN	TAMPILAN INOVASI
		<p>ASIKK Pegawai yang akan keluar kantor hanya perlu membuka Aplikasi ASIKK dari perangkat komputer diruangan setiap Pegawai</p>				
3	Anjungan Layanan Mandiri	<p>Pelayanan berupa komputer dari Pengadilan Negeri Semarang yang berada didepan meja Lobby, untuk dapat memudahkan Pengguna Pengadilan. Disana Para Pengguna Pengadilan yang kurang memahami mengenai pengajuan Pelayanan Pengadilan dapat menggunakan komputer tersebut dengan</p>	<p>Adanya pengguna pengadilan yang membutuhkan sarana dalam melengkapi kebutuhan dokumen pengguna pengadilan tersebut</p>	Pengguna Pengadilan		

NO	NAMA INOVASI	URAIAN INOVASI	LATAR BELAKANG GAGASAN INOVASI	PENGGUNA INOVASI	PENGHARGAAN	TAMPILAN INOVASI
		didampingi oleh Petugas dari Pengadilan Negeri Semarang ataupun jika Pengguna Pengadilan yang tidak memiliki perangkat Komputer dirumahnya pun dapat menggunakan layanan tersebut.				
4	Mesin Antrian PTSP	Layanan yang diberikan kepada pihak yang akan ingin mendapatkan layanan PTSP agar terjadi antrean yang tertib	Adanya keluhan dari masyarakat yang merasa bahwa sudah mengunggu akan tetapi orang lain yang terlebih dahulu mendapatkan layanan dari petugas PTSP	Masyarakat		 
5	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Untuk mewujudkan peningkatan mutu	Adanya keinginan masyarakat khususnya	Masyarakat		



NO	NAMA INOVASI	URAIAN INOVASI	LATAR BELAKANG GAGASAN INOVASI	PENGGUNA INOVASI	PENGHARGAAN	TAMPILAN INOVASI
	<p>pada Zetting Platz Kantor PN Semarang di Kecamatan Nusa Penida</p>	<p>pelayanan Peradilan dengan cara mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan, maka PN Semarang memberlakukan PTSP pada zetting platz Kantor PN Semarang di Kecamatan Nusa Penida</p>	<p>wilayah Nusa Pedina untuk dapat lebih mudah berkonsultasi terhadap permasalahan hukum yang dialami</p>			



## BAB VII. PENUTUP



## **BAB VII PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan laporan tersebut diatas maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Untuk memberi pelayanan yang maksimal Pengadilan Negeri Semarapura guna mendukung program Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Tinggi Negara untuk mempertahankan raihan prestasi selama ini secara berkesinambungan di bidang tata kelola aset dan anggaran selama ini seperti Opini Laporan Keuangan dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut – turut sejak tahun 2012 – 2016, selain itu Mahkamah Agung senantiasa masuk 4 besar dalam realisasi anggaran maka penambahan Sumber Daya Manusia khususnya bidang non teknis (kesekretariatan) merupakan suatu keharusan melihat kondisi dan komposisi tenaga kesekretariatan peradilan saat ini.
2. Pada bidang teknis dipandang perlu untuk memberikan pertimbangan antara jumlah perkara dengan jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Semarapura.
3. Di bidang sarana dan prasarana hendaknya diadakan penambahan rumah dinas Hakim dan biaya pemeliharaan rumah dinas hakim. Disamping itu, hendaknya perlu dibangun gedung Pengadilan Negeri Semarapura karena gedung yang ada sekarang sudah berdiri sejak tahun 1979.

### **B. REKOMENDASI**

Pengadilan Negeri Semarapura sangat kekurangan Tenaga Petugas Administrasi baik di sekretariatan maupun di penaiteraan banyak di rangkap oleh tenaga panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti dimana staf yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Semarapura sebanyak 2 (dua) orang, sehingga dapat menghambat Pengisian Register perkara baik pidana maupun perdata, untuk itu kami mohon dapat ditambah Tenaga Staf Administrasi Non Teknis untuk pengisian register perkara perdata maupun pidana serta menguasai IT. Untuk di bagian Kesekretaritan juga terdapat tenaga teknis seperti juru sita yang di perbantukan di bagian Umum dan Keuangan, dan tenaga PPNPN yang diperbantukan pada bagian Kepegawaian dan Umum Keuangan.

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2023 ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan selanjutnya.